



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NURUL INDARTI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN MANAJEMEN
3. NHK : 852308

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.970.000.000

1. Tanah Seluas 498 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 996.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 270 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 400.000.000
4. Bangunan Seluas 33 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 888.500.000
5. Tanah Seluas 2.285 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 685.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 901.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 431.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 109.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.224.443.387

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. ----

Rp. 6.204.443.387

**III. HUTANG**

Rp. 400.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.804.443.387

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.